

SKRIPSI

PERAN LEMBAGA ADAT TONGKONAN DALAM PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI LEMBANG PALIPU KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA



**OLEH :
RHONY ANDRHES LINTHIN
B111 11 009**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

**Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Pelaksanaan Gadai
Tanah Pertanian di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek
Kabupaten Tana Toraja**

Disusun dan diajukan oleh :

RHONY ANDRHES LINTHIN

B 111 11 009

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian studi sarjana

pada Bagian Hukum Perdata

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

Disusun dan diajukan Oleh

RHONY ANDRHES LINTHIN

B111 11 009

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Rabu, 13 Mei 2015
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian :

Ketua,


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H
Nip. 196712311991032002

Sekretaris,


H. M. Ramli Rahim, S.H., M.H
Nip. 195307271981031007

A.n, Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H
Nip. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RHONY ANDRHES LINTHIN
No. Pokok : B111 11 009
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam
Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Lembang
Palipu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana
Toraja.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 20 April 2015

A.n Dekan

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H
Nip. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : **RHONY ANDRHES LINTHIN**

Nim : **B111 11 009**

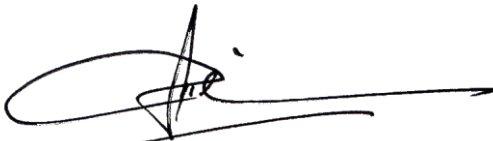
Bagian : **HUKUM PERDATA**

Judul : **Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Pelaksanaan
Gadai Tanah Pertanian di Lembang Palipu Kecamatan
Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, April 2015

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
Nip. 196712311991032002

PEMBIMBING II



H.M. Ramli Rahim, S.H., M.H
Nip. 195307271981031007

ABSTRAK

Rhony Andrhes Linthin (B111 11 009) *Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja*. Penulisan skripsi ini di bimbing oleh Ibu Farida Patittingi, sebagai pembimbing I dan Bapak Ramli Rahim, sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan gadai tanah pertanian dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dan untuk mengetahui Peran Lembaga Adat Tongkonan dalam proses penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang dikhususkan pada Lembang Palipu. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu pemangku adat Tongkonan Layuk Biang, Kepala Lembang Palipu, masyarakat Lembang Palipu yang menggadaikan tanahnya, serta masyarakat Lembang Palipu yang bersengketa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tata cara gadai tanah pertanian pada masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu dilaksanakan dalam bentuk lisan dan tanpa batas waktu yang dalam pelaksanaannya wajib disaksikan oleh *To' Parenge'* Tongkonan Layuk Biang karena gadai tanah pertanian merupakan perjanjian adat. Dalam proses pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu melalui tiga tahapan penting, yaitu : *dimisararai*, *melambi*, dan *masulang*. (2) Peran Lembaga Adat Tongkonan dalam proses penyelesaian sengketa gadai dipercaya oleh masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu karena sifat dasar dari gadai ialah kekeluargaan (*sangsiuluran*) sehingga proses penyelesaian sengketa gadai juga diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan dan aturan hukum adat.

KATA PENGANTAR

Segala hormat, pujian dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat dan kekuatan yang senantiasa memberkati kehidupan penulis dengan rancangan damai sejahtera, yang oleh karena penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja”** dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Keperdataan Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Lewat kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ayah dan Ibu ku tersayang. Yohanis K. Linthin dan alm. Alfrida Bara Tau'. Terima kasih untuk doa, dukungan dan pengorbanan yang ayah berikan. Terima kasih telah membesarkanku, merawatku diwaktu ku sakit, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang begitu melimpah yang ibu berikan kepadaku, meskipun aku tidak lagi bersamamu tapi, kasih sayangmu akan ku ingat seumur hidupku. Terima kasih kepada kakak-kakak ku Rita L, Dani T, Aris yang selalu menasehati, mengingatkan, menghibur penulis disetiap waktu. Terima kasih juga kepada Om Titus Tandi, Tante Mangallo dan Tante Elis yang senantiasa mengarahkan, membimbing penulis selama berada dibangku perkuliahan.

Terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UNHAS, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palabuhu, MA
2. Dekan Fakultas Hukum UNHAS Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
3. Pembantu Dekan I Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H, Pembantu Dekan II Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, dan Pembantu Dekan III Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak H. M. Ramli Rahim, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengajar dan membagikan Ilmu pengetahuannya kepada penulis dari awal proposal sampai kepada penyusunan skripsi.
6. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Salle', S.H., M.H, Ibu Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur. S.H., M.H yang juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, masukan, dan Ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

7. Keluarga besar masyarakat Lembang Palipu atas setiap keramataman, bantuan dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian. Hanya ucapan terima kasih yang mendalam yang dapat penulis berikan kepada Pemangku adat Tongkonan Layuk Biang di Lembang Palipu Bapak/kakek Samuel Seru' yang memberikan banyak arahan dan pengetahuan kepada penulis, juga kepada Pemerintah setempat khususnya kepada Kepala Lembang Palipu bapak Samuel Manuk Rante' yang sangat membantu lewat pengetahuan maupun data-data yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu, serta seluruh masyarakat yang terlibat dalam penelitian yakni bapak Andarias Rerung, bapak Simon Toto dan bapak Markus Pasang. Terima kasih atas bantuan yang telah kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kak Soldy' yang selama ini telah menjadi kakak rohani dan teman-teman PA ku, yang senang tiasa berbagi kekuatan dan menemaniku melalui hari-hari yang sulit.
9. Kak Jean Alex, SH atas bantuan, arahan dan pengetahuan yang bersedia dibagikan kepada penulis.

10. Adik Wiwik Meilarati Saloko (WMS) terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis dari awal penyusunan proposal sampai terelesaiannya skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku, Adi, Andi Rusdi, Azwar, dan Fandi. Terima kasih untuk persahabatannya selama ini.
12. Saudara-saudara ku, keluarga besar PMK FH-UH, Kak Joner, S.H, Kak Lewi, Kak Vengky, Kak Darius, S.H, Kak Yonna, S.H, Kak Agustiana Manga, S.H, Kak Agung, Kak Dimas, S.H, Kak Andika S.H, Kak Veny, S.H, Kak Unan, Gideon Tandingan, Adrian (Morgan), Yohanis Sumule Datu Tiku, Intan Karangan, S.H, Ifany Oktavia, S.H, Jhon Rerung Allo, Miky Idil Pratama, Vivilia, Astrid Mangalik, Trigita Tiku Padang, Eva Novelda, Aprilia Wulandari, Shela, Keysia, Eden, Rere, Meita, Aditia, Daud Eko Cahyo, Nelwan, Prandi, Ciko Mangesa, Hendry, Dosma, Yunita Paranoan, Adik Susanto Pararuk, Adik Aldy CBR, Adik Cery, Adik Lota, Adik Fenty, Adik Ucok, Adik Destri, Adik April, Adik Nelson Sirenden, dan Adik Stanza Nusa. Terima Kasih atas Kebersamaan dan telah menjadi keluarga kedua bagi penulis selama berada di Fakultass Hukum Universitas Hasanuddin, Tetap Renda Hati dan Selalu Siap Untuk Melayani.
13. Teman-teman KKN reguler angkatan 85 Kabupaten Bone Kecamatan Bengo Khususnya desa Mattaropili, Kak Fadly, Kak

Naya, Kak Lia, Nur, Harison Bunga Salu, Santia Agi' atas kebersamaan dan kerjasamanya Selama Proses KKN.

14. Teman- teman Mediasi 011 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pertemanan dan dukungannya selama ini.

Akhir kata, penulis sangat menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis dengan tulus hati, lapang dada dan tangan terbuka menerima segala kritikan yang bermanfaat untuk melengkapi segala kekurangan yang ada. Bagaimanapun juga, besar harapan penulis agar kiranya penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para pembaca serta penulisan-penulisan selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Makassar, 3 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Lembaga Adat	9
B. Tongkonan Sebagai Lembaga Adat	13
C. Tinjauan Umum Mengenai Tanah	21
D. Transaksi Tanah	24
E. Gadai Tanah	25
BAB 3 METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Sumber Penelitian	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Populasi dan Sampel	39
E. Analisis Data	40
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Tentang Tana Toraja	41

B. Latar Belakang Lembang Palipu	46
C. Tata Cara Pelaksanaan Gadai Tanan Pertanian Dalam Masyarakat Adat Toraja di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabuapten Tana Toraja	47
D. Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian Dalam Masyarakat Adat Toraja di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja	57
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajemukan merupakan salah satu kondisi sosial dari masyarakat Indonesia. Keanekaragaman kondisi sosial masyarakat itu merujuk pada suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Suatu kelompok sosial terbentuk karena adanya kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu adanya kesamaan pendapat atau kepentingan tertentu juga dapat menjadi faktor pembentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Keberadaan kelompok masyarakat pada saat ini sangat nampak pada kehidupan masyarakat pedesaan atau masyarakat pedalaman khususnya Indonesia yang merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku dari tiap penduduknya. Kelompok ini merujuk pada kehidupan masyarakat adat yang memiliki jiwa sosial yang didasarkan oleh kepercayaan leluhur yang kemudian berkembang dengan adanya suatu kesepakatan dan tujuan yang ingin dicapai dalam lingkup aturan adat-istiadat serta masyarakat yang ada di dalamnya, kemudian berkembang menjadi suatu Lembaga Adat yang memiliki fungsi sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, menciptakan dan mempertahankan kehidupan yang harmonis, dan menjaga kebiasaan serta nilai-nilai adat yang bersumber

dari leluhur yang dipercaya oleh masyarakat serta menjadi mediator dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat adat itu sendiri.

Pada dasarnya setiap daerah memiliki Lembaga Adat tersendiri yang didasari oleh nilai, norma adat-istiadat yang masih dianut oleh masyarakat yang ada di dalamnya, selain untuk menjaga nilai budaya, setiap Lembaga Adat juga memiliki fungsi tersendiri dalam pelaksanaannya termasuk mengenai pemanfaatan beserta transaksi tanah yang menjadi kebiasaan dari sebuah masyarakat adat.

Berdasarkan data awal yang diterima penulis, kehidupan masyarakat adat Toraja pada saat ini masih menjaga eksistensi dari Lembaga Adat Tongkonan seperti halnya di Lembang Palipu, Kecamatan Mengkendek yang tetap menjaga eksistensi dari Lembaga Adat Tongkonan dalam hal ini Tongkonan Layuk Biang yang dipimpin oleh seorang pemangku adat (*To' Parengé*). Hal tersebut didasari oleh kepercayaan masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu terhadap Tongkonan Layuk Biang yang menjadi pusat panutan dan pengajaran yang berlandaskan kepercayaan dan ajaran leluhur (*aluk sanda saratu*), serta didukung kepercayaan terhadap hukum adat oleh masyarakat di Lembang Palipu yang mengikat dalam setiap aktivitas bermasyarakat.

Adapun Tongkonan Layuk Biang sebagai Lembaga Adat memiliki peran penting dalam mengatur masyarakat adat, menjaga dan melestarikan hukum adat, mengatur pemanfaatan tanah dalam hal ini

menyangkut pelaksanaan upacara adat, memiliki peran dalam transaksi-transaksi tanah yang dilakukan masyarakat adat, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu.

Meskipun demikian, sistem pemerintahan Lembaga Adat Tongkonan Layuk Biang di Lembang Palipu tidak berfungsi lagi seperti sebelumnya setelah Indonesia menjadi Negara kesatuan, yang menjadikan sistem pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat pedesaan di ambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintahan pada tingkat pedesaan diatur oleh aparat desa (*Kepala Lembang*), namun di sisi lain Lembaga Adat Tongkonan Layuk Biang (*To' Parengé*) memiliki kewenangan untuk menentukan calon Kepala Lembang yang akan menjabat didasarkan pada strata atau status sosialnya.

Tanah erat sekali hubungannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti yang ada di Tana Toraja. Hampir seluruh wilayahnya mencakupi wilayah perbukitan, oleh karena itu mayoritas penduduknya adalah petani yang menggantungkan hidup pada pengelolaan tanah. Selain itu, dalam adat istiadat masyarakat Toraja tanah sangat berperan penting dalam pelaksanaan upacara adat kematian (*Rambu Solo'*) dan upacara Ungkapan Syukur (*Rambu Tuka*), dimana tanah digunakan sebagai objek untuk melangsungkan upacara tersebut. Selain itu tanah juga erat kaitannya dengan pengadaan rumah adat Tongkonan beserta

kuburan (*liang*.) sekaligus berfungsi menyatukan suatu rumpun keluarga. Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Agraris, dimana tanah sangat berpengaruh besar dalam kehidupan rakyat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berbicara tentang pemanfaatan tanah dalam masyarakat erat kaitannya dengan transaksi tanah dalam hal ini transaksi gadai. Gadai tanah adalah penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan dimana pemilik tanah berhak mengambil kembali tanah itu setelah melakukan pembayaran yang sama jumlahnya. Transaksi gadai merupakan salah satu bentuk transaksi yang telah lama ada dan diatur oleh hukum adat.

Dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu, tanah dapat dipindahtangankan atau digadaikan karena dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu gadai bersifat sosial. Dalam gadai terdapat unsur tolong menolong untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh keluarga maupun tuntutan adat yang mendesak sehingga dalam pemahaman masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu, gadai (*ma pa'pentoean*) tidak ada unsur pemerasan yang merugikan pihak tertentu tetapi murni untuk membantu keluarga yang membutuhkan.

Pelaksanaan Gadai tanah pertanian dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu didasarkan pada aturan adat istiadat, asas kekeluargaan dan kepercayaan yang dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat yang terikat dalam perjanjian gadai. Dampak positifnya ialah membangun hubungan silaturahmi dan mempererat ikatan sesama keluarga dan masyarakat adat. Dampak negatifnya bisa terjadi persengketaan, khususnya terhadap gadai yang telah berlangsung selama puluhan tahun, karena pihak pemberi gadai (pemilik tanah) belum mampu menebus tanah yang digadaikan kepada penerima gadai. Sedangkan dalam Pasal 7 UU No. 56 Prp. Tahun 1960 diatur bahwa pemegang gadai wajib mengembalikan tanah kepada pemiliknya setelah gadai berlangsung selama 7 (tujuh) tahun tanpa menuntut pembayaran uang tebusan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan dengan melakukan wawancara dengan *To' Parengge'* (pemangku adat), bahwa persengketaan gadai timbul ketika gadai beralih kepada ahli waris masing-masing pihak dimana pihak ahli waris penerima gadai tidak mengakui lagi bahwa tanah tersebut adalah tanah gadai yang hanya dikelola sementara oleh penerima gadai sampai diadakannya penebusan oleh pemilik tanah, melainkan ahli waris penerima gadai mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya secara sah yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Akibat dari pengakuan sepihak ini, maka hak atas tanah dari pemberi gadai yang

diwakili oleh ahli warisnya dianggap tidak pernah ada oleh pihak ahli waris penerima gadai.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana tata cara pelaksanaan gadai tanah pertanian yang menjadi ciri khas dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja serta bagaimana peran Lembaga Adat Tongkonan dalam proses penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan gadai tanah pertanian dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ?
2. Bagaimana peran Lembaga Adat Tongkonan dalam proses penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui tata cara pelaksanaan gadai tanah pertanian dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk Mengetahui peran Lembaga Adat Tongkonan dalam proses penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan terlebih khusus pengembangan hukum keperdataan dibidang hukum agraria dan hukum adat dalam hal ini menyangkut tentang gadai tanah pertanian secara adat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintah dan masyarakat untuk memahami peran serta Lembaga Adat Tongkonan dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Adat

1. Pengetian Lembaga Adat

Lembaga Adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata Lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga Lembaga Adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Menurut ilmu budaya, Lembaga Adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Sedangkan menurut pengertian lainnya, Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum

adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Kemudian adapun pendapat yang menyatakan Lembaga Adat ialah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

Pengertian Lembaga Adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan

membangun adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

2. Peran dan Wewenang Lembaga Adat

Lembaga Adat mempunyai peran yang sangat penting, dimana Lembaga Adat bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Peran Lembaga Adat sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain :

- a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
- b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul dimasyarakat. Kemudian, Lembaga Adat juga memiliki peran lain yaitu :
 - a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
 - b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya.

- c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial dan keagamaan.
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Selain dari pada peran yang dimiliki oleh Lembaga Adat, Lembaga Adat juga memiliki wewenang yang meliputi

- a) Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut.
- b) Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
- c) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan.
- d) Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat.
- e) Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa.

- f) Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/ kota desa adat tersebut berada.

B. Tongkonan Sebagai Lembaga Adat

Dalam masyarakat adat Tana Toraja pada umumnya ada 2 (dua) pranata yang dapat menggambarkan perwujudan suatu kekerabatan masyarakat adat Toraja, yaitu *Banua Tongkonan* (rumah adat) dan *Liang* (kuburan keluarga). *Banua Tongkonan* adalah rumah adat masyarakat Toraja yang menjadi simbol kekerabatan yang mempunyai peranan dalam menjaga dan melestarikan aturan adat-istiadat.

Tongkonan berasal dari kata *Tongkon* adalah tempat duduk mendengarkan perintah dan penjelasan serta duduk menyelesaikan masalah. *Tongkonan* ini mula-mula didirikan oleh penguasa dalam wilayah tertentu untuk menjalankan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat adat.¹

Tongkonan memiliki peran penting, dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakat adat agar hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat lainnya serta masyarakat adat dengan alam sekitarnya. Masih nampak dalam kehidupan masyarakat adat Toraja dimana masyarakat adat Toraja mengandalkan Tongkonan yang dikepalai

¹ Peter Pata Sumbung, 2010, *Toraja Tallu Lembangna*, Keluarga Besar Tallu Lembangna Jabodetabek, Jakarta, hlm. 51.

oleh *To' Parenge'* dalam mengatur dan menata kehidupan bermasyarakat agar tercipta masyarakat yang menghormati satu sama lain yang dilandaskan pada aturan adat yang ada sejak dahulu kala. Fungsi Tongkonan dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat adat yang ada di dalam wilayahnya nampak ketika terjadi perselisihan dalam masyarakat adat. Tongkonan yang dikepalai oleh *To' Parenge'* hadir sebagai hakim pendamai dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat adat serta memperbaiki hubungan keluarga yang renggang sebagai akibat dari perselisihan tersebut.²

Tongkonan pada awalnya ialah tempat penguasa dan sumber perintah dalam mengatur segala proses kehidupan masyarakat adat. Tugas dan tanggung jawab ini diwariskan oleh penguasa terdahulu kepada keturunannya secara turun-temurun, sampai pada saat ini. Oleh sebab itu, kekuasaan tersebut merupakan hak dan tugas warisan bagi seseorang yang dipercaya dalam memimpin dan mengatur kehidupan masyarakat adat, sehingga nyata fungsi Tongkonan sebagai sumber kekuasaan adat yang menjadi tempat pertalian yang menghubungkan kehidupan seluruh keluarga/keturunan dari orang yang mendirikan Tongkonan dengan masyarakat yang hidup dalam wilayah kekuasaan Tongkonan.³

² Petrus, Wawancara, Fungsi Tongkonan, Mengkendek Tana Toraja, 21 Desember 2014.

³ Mohammad Nadsir Sitonda, 2007, *Toraja Warisan Dunia*, Pustaka Refleksi., Makassar, hlm. 30.

Tongkonan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan budaya masyarakat adat Toraja. Selain memiliki kekuasaan yang dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat yang hidup di dalam wilayah adat sebuah Tongkonan, Tongkonan juga sebagai sumber kesatuan keluarga yang mengikat setiap garis keturunannya.⁴

Adapun Tongkonan sebagai Lembaga Adat memiliki peran diantaranya sebagai berikut :⁵

- Menjaga dan melestarikan aturan adat istiadat.
- Sumber kekuasaan dan peraturan adat
- Mengelola dan membina warisan keluarga (*mana'*) baik warisan berupa harta pusaka maupun hak dan kekuasaan atas tanah yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat adat.
- Menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam lingkup masyarakat.
- Mengatur pemanfaatan tanah untuk digunakan dalam pelaksanaan upacara adat.
- Berperan dalam pelaksanaan transaksi-transaksi tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam lingkup wilayah adatnya.
- Merencanakan kegiatan upacara adat *Rambu Solo'* dan *Rambu tuka'* lingkup keluarga dan masyarakat yang ada di dalam wilayah adatnya.

⁴ Tangdilintin, 1983, *Toraja dan Kebudayaanannya*, Yayasan Lepongan Bulan., Tana Toraja. hlm. 32.

⁵ Peter Pata Sumbung, 2010, *Toraja Tallu Lembangna*, Keluarga Besar Tallu Lembangna Jabodetabek, Jakarta, hlm. 52.

Dalam merumuskan setiap kebijakan untuk kepentingan bersama, Tongkonan sebagai Lembaga Adat diwakili pemangku adat (*To' Pareng'e*'), beserta pembantu pemangku adat berkumpul memusyawarakannya. Demikian pula, jika terjadi pertikaian atau sengketa antara anggota masyarakat, pemangku adat beserta pembantu pemangku adat berkumpul untuk memusyawarakannya, memeriksa sengketa dan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan adat yang ada. Melalui pertemuan khusus dari para pemangku adat beserta pembantu pemangku adat yang ditunjuk kepada pihak tertentu yang biasa disebut *dikombongan*, dalam hal ini mereka yang berselisih diadili dan diperiksa secara bersama.

Adapun Tongkonan pada saat ini, masih digunakan oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi di sisi lain Tongkonan tidak lagi mengurus masalah pemerintahan, hal ini disebabkan Toraja berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sehingga yang mengambil alih pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke pedesaan ialah pemerintah pusat. Pemerintahan ditingkat desa diatur oleh aparatur desa (*Kepala Lembang*), namun di sisi lain Tongkonan sebagai Lembaga Adat memiliki kewenangan untuk menentukan kepala lembang yang akan menjabat didasarkan pada strata atau status sosialnya. Dalam hal ini haruslah keturunan asli Tongkonan yang memiliki kekuasaan adat (*Tongkonan Layuk*). Sehingga aparatur pedesaan (*Kepala Lembang*)

dengan Tongkonan (*To' Parenge'*) bersama mengatur kehidupan masyarakat didasarkan oleh aturan pemerintah yang digabungkan dengan aturan adat-istiadat.⁶

Dalam upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Toraja, seorang pemangku adat berperan aktif di dalamnya. Upacara adat dalam masyarakat adat Toraja memiliki arti yang sama dengan sebuah kepercayaan, dalam hal ini kepercayaan jika tidak dilaksanakan maka yang bersangkutan akan mengalami kesialan atau adanya akibat buruk yang akan menimpa mereka.

Pertemuan untuk membuat suatu kebijakan demi kepentingan bersama mutlak dihadiri oleh pemangku adat beserta para pembantu pemangku adatnya untuk merencanakan pesta ucapan syukur tahunan, merencanakan pelaksanaan upacara adat kematian baik yang dialami oleh keluarga maupun masyarakat adat, yang melingkupi prosesi pelaksanaan sampai berakhirnya upacara kematian, jumlah hewan yang akan dikorbankan yang menyangkut tentang pembagian daging korban kepada masyarakat, serta pembuatan irigasi yang menyangkut kepentingan orang banyak dan sebagainya.

To' Parenge' memiliki peran dalam mengatur kehidupan serta kebudayaan masyarakat adat. Pengangkatan dan penggantian *To' Parenge'*, ditetapkan oleh dewan adat dalam hal ini keluarga yang ada

⁶ Yohanis, Wawancara, *Tongkonan dan Kepala Lembang*, Mengkendek Tana Toraja, 24 Desember 2014

dalam Tongkonan serta perwakilan masyarakat yang memiliki ikatan erat dengan Tongkonan. Pengangkatan pemangku adat ini ditetapkan berdasarkan *aluk ma' lolo tua'* yaitu aturan dan agama yang menyangkut pemeliharaan kehidupan manusia. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi seorang calon pemangku adat ialah : haruslah ia pandai dalam berbicara, pandai dalam menyusun sebuah silsilah keluarga, mapan secara ekonomi, mengamalkan aturan agama, dipercaya oleh masyarakat adat serta mampu menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di dalam lingkup keluarga serta masyarakat.⁷

Seluruh jabatan yang ada dalam suatu Lembaga Adat Tongkonan adalah jabatan yang diberikan turun-temurun dari satu rumpun keluarga, dimana semua keturunan dari Tongkonan berhak atas jabatan tersebut. Oleh karena itu, orang yang memperoleh jabatan tersebut sewaktu-waktu dapat diganti oleh keturunan yang ada dalam lingkup garis keturunan suatu Tongkonan.

Tongkonan dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga Adat, mendapatkan penghargaan dari masyarakat adat berupa pemberian kepala dan tanduk kerbau dalam upacara adat kematian (*Rambu Solo'*). Pemberian kepala dan tanduk kerbau melambangkan status Tongkonan, dimana Tongkonan tersebut merupakan Tongkonan tertua yang memiliki

⁷ Yakobus Sombolinggi, Wawancara, *To parenge'*, Mengkendek Tana Toraja, 31 Desember 2014.

peran dalam menjaga adat-istiadat, mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat.⁸

Selain dari penghargaan yang diberikan kepada Tongkonan, *To' Parengé'* juga mendapatkan penghargaan dari masyarakat adat berupa upah jasa. Sebagai contoh ketika *To' Parengé'* melakukan suatu pekerjaan seperti mengelola sawah dan membangun suatu rumah, masyarakat yang ada dalam wilayah adat suatu Tongkonan akan membantu mengerjakannya secara gotong royong. Di samping itu, *To' Parengé'* juga mendapatkan upah pemberian berupa daging kurban baik dalam upacara kematian (*Rambu Solo'*) dan upacara syukuran (*Rambu tuka'*). *To' Parengé'* sebagai perwakilan Lembaga Adat Tongkonan, sangat di hormati oleh masyarakat sehingga melalui upah atau balas jasa ini, masyarakat dalam suatu wilayah adat Tongkonan berterima kasih atas jasa-jasa dari *To' Parengé'*.

To' Parengé' bekerja sama dengan *Kepala Lembang* yang menciptakan hubungan harmonis dalam pelaksanaan upacara adat, yang menyangkut tentang tata cara pelaksanaan upacara adat seluruhnya dan diatur oleh pemangku adat. Begitu pula dengan *Kepala Lembang* yang diberikan kewenangan oleh *To' Parengé'* untuk memungut retribusi pemotongan hewan dari pihak keluarga maupun dari masyarakat. Retribusi pemotongan hewan ini memberikan keuntungan dalam

⁸ Dani Tulak, Wawancara, *Penghargaan Kepada Tongkonan*, Mengkendek TanaToraja , 2 januari 2015.

memajukan suatu daerah, dimana hasil dari retribusi tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di pedesaan serta menyejahterakan masyarakatnya.

Ketika terjadi sengketa atau masalah di dalam kehidupan masyarakat adat, *To' Parengé'* bersama *Kepala Lembang* menyelesaikan masalah tersebut dengan cara melalui musyawarah kekeluargaan. *To' Parengé'* diberikan kewenangan dalam menyelesaikan masalah berdasarkan hukum adat yang berlaku sedangkan *Kepala Lembang* memiliki peran dalam mengawasi proses penyelesaian masalah tersebut.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tanah

Secara umum sebutan tanah dalam keseharian dapat dipakai dalam berbagai arti, oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diberi balasan agar dapat diketahui dalam arti tersebut digunakan, Menurut kamus besar bahasa indonesia tanah dapat diartikan :

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang terletak pada bagian paling atas
- b. Keadaan bumi disuatu tempat
- c. Permukaan bumi yang diberi batas
- d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).

Sebutan agrarian (tanah) tidak selalu dipakai dalam arti yang sama. dalam bahasa latin *agre* berarti tanah atau sebidang tanah. Dalam kamus latin Indonesia *agrarius* berarti : perladangan, persawahan pertanian dalam ruang lingkup agrarian, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi.⁹ Pasal 1 angka(4) UUPA dalam penjelasan umum menjelaskan bahwa pengertian bumi selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi yang ada di bawahnya dalam hal ini disebut sebagai tanah yang dapat dikuasai oleh seseorang. Jadi pada intinya tanah ialah permukaan bumi.

Menurut hukum adat tanah memiliki arti yang lebih spesifik karena sifatnya yang *magis religius*. Keterkaitan antara masyarakat atau kelompok manusia dengan tanah sangat erat bahkan tidak dapat dipisahkan dan hubungannya bersifat abadi.

Berdasarkan pengertian tanah yang ada di atas, dapat memberi pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis. Selain itu tanah bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan namun tanah sering juga menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia

⁹ Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Agraria Nasional*. Djambatan., Jakarta, hlm. 4.

sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 2 dikemukakan bahwa sebidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas”.

Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu “ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang orang lain serta badan hukum.¹⁰

Dengan demikian yang dimaksud dengan istilah tanah dalam Pasal di atas ialah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum

¹⁰ Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana., Jakarta, hlm.10.

yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.

Jelas bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Sedangkan ruang dalam pengertian yuridis, yang terbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar, dan tinggi yang dipelajari dalam Hukum Tata Ruang.

Tanah menurut pengertian Hukum Tanah Nasional (HTN) di Indonesia yakni bagian integral dari kulit bumi, termasuk segala apa yang ada di dalamnya dan di atas tanah yang bersangkutan.

D. Transaksi Tanah

Dalam transaksi tanah terdapat dua macam transaksi dimana sering disebut transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum sepihak dan transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak.

Pada transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak menjelaskan suatu perjanjian antara dua pihak dalam hal ini terjadinya pengalihan atau penyerahan dengan pembayaran kontan (timbang balik) melalui sebuah transaksi misalnya : menjual gade, menjual lepas, dan

menjual tahunan.¹¹ Inti dari transaksi ini adalah pengoperan ataupun penyerahan dengan disertai pembayaran kontan dari pihak lain pada saat itu juga.¹²

Transaksi jual ini berdasarkan isinya dapat dibedakan dalam tiga macam sebagai berikut :¹³

- 1) Penyerahan tanah dan pembayaran kontan tanpa syarat, jadi untuk seterusnya/selamanya. Transaksi ini disebut dengan jual lepas
- 2) Penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang, yang dibayar dengan tunai disertai ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan membayar uang yang sama jumlahnya. Transaksi ini disebut jual gadai (jual gade, ngajual akad)
- 3) Penyerahan tanah dengan pembayaran uang secara tunai disertai perjanjian, bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum lain, sesudah satu, dua tiga, atau berapa kali panen, tanah itu kembali lagi kepada pemilik tanah semula. Transaksi ini disebut dengan jual tahunan.

¹¹ A. Suriyaman Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*, Pelita Pustaka., Jakarta, hlm. 146.

¹² Soerojo wignjodipoero, 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Joko Gunung Agung., Jakarta, hlm. 207.

¹³ A. Suriyaman Mustari Pide, *Loc. Cit.*

E. Gadai Tanah

1. Gadai Tanah Dalam hukum adat

Gadai tanah merupakan salah satu dari transaksi atas tanah yang telah lama diatur oleh hukum adat. Gadai tanah biasa disebut dengan jual gadai. Para ahli hukum memberikan pendapat tentang pengertian gadai menurut hukum adat seperti yang diungkapkan oleh Mr. Van Vollenhoven dan Mr. Ter Har Bzn, sebagai berikut :

*“ Perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan Untuk Menerima tunai sejumlah uang, dengan permufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu kedirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama, maka perjanjian (transaksi) sedemikian itu oleh Van Vollenhoven dengan konsekuensi dinamakan gadai tanah (pertanian/sawah) [ground (-sawah) –verpanding]”.*¹⁴

Gadai tanah dalam masyarakat hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gadai tanah tersebut kecuali apabila antara kedua belah pihak terlebih dahulu membuat perjanjian yang menyangkut batas tentang berakhirnya gadai tersebut.

Beberapa penulis buku yang membahas tentang hukum adat dalam bukunya memberikan pengertian tentang gadai tanah diantaranya ;

Menurut Guru besar Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, akan tetapi yang menyerahkan mempunyai hak untuk mengambil kembali tanah itu

¹⁴ Liliek istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional, Usaha Nasional...*, Sarubaya, hlm. 52.

dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya: *menggadai* (*minangkabau*), *menjual gade*, *adol sande* (*jawa*), *ngajual akad* atau *gade* (*Sunda*).¹⁵

Menurut Prof. Boedi Harsono, gadai tanah adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut masih dalam penguasaan pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai.

Menurut Effendi Parangin, pengertian gadai menggadai tanah yaitu, Gadai menggadai tanah biasanya dilakukan di muka kepala persekutuan dalam hal ini kepala desa atau kepala adat. Kehadiran pejabat tersebut umumnya bukan merupakan syarat bagi sahnya gadai menggadai itu, melainkan dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan, dan demikian mengurangi resiko pemegang gadai jika kemudian hari ada sanggahan. Dari gadai menggadai itu biasanya juga dibuatkan akta atau bukti yang tertulis.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, gadai atau yang sering disebut dengan jual gadai adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa

¹⁵ A. Suriyaman Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang*. Pelita Pustaka., Jakarta, hlm. 146

¹⁶ Effendi Parangin, 1986, *Mencegah Sengketa Tanah*, Rajawali., Jakarta, hlm, 307.

sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut.¹⁷

Menurut Prof. Bushar Muhammad, Menjual gadai adalah yang menerima tanah berhak untuk mengerjakan tanah itu serta untuk memungut hasil dari tanah itu ia hanya terikat oleh janjinya bahwa tanah itu hanya dapat ditebus oleh yang menjual gadai.¹⁸

Menurut Van Dijk gadai tanah adalah perpindahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang, yang dibayarkan dengan tunai, dan orang yang memindahkan hak tanah (si pemberi gadai atau yang menggadaikan) dapat memperoleh kembali tanahnya, jika ia membayar kembali kepada yang mendapatkan tanah uang sebanyak yang telah diterimanya dulu.¹⁹

Menurut Imam Sudiyat gadai tanah adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.²⁰

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pemberi gadai berhak untuk menebus kembali tanah yang telah ia gadaikan tergantung dari waktu dan kemampuan dari pemberi gadai untuk menebus tanahnya kembali. Di sisi lain, penerima gadai tidak boleh memaksakan

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia (Cet V)*, PT. Rajawali Grafindo Perkasa., Jakarta, hlm. 192.

¹⁸ Bushar Muhammad, 2002, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita., Jakarta, hlm. 114.

¹⁹ Van Dijk, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan : A. Soehardi, Mandar Maju, Bandung., hlm. 81.

²⁰ Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat : Sketsa Asas*, Liberty., Jogjakarta, hlm. 28.

kehendaknya kepada pemberi gadai agar menebus tanah yang telah digadaikan tersebut. Hak menebus ini juga dapat dilakukan oleh ahli waris pemberi gadai.

Sebagai transaksi atas tanah, dalam perbuatan gadai tanah terjadi pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pemegang gadai. Pemegang gadai dalam hal ini mempunyai hak-hak sebagai berikut :²¹

- a. Menggunakan serta memungut hasil dari tanah yang sementara dia pegang sebagai akibat dari perbuatan transaksi tanah berupa transaksi gadai tanah dengan batasan tidak boleh menjual lepas kepada orang lain.
- b. Menganak gadaikan, dalam artian pemegang gadai menggadaikan kembali tanah tersebut kepada orang lain, jika yang bersangkutan dalam hal ini pemegang gadai sangat membutuhkan uang, karena tidak dapat memaksa si penjual gadai semula untuk menebus tanahnya.

Dalam hukum adat berakhirnya sebuah hak gadai dikarenakan penebusan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai atas tanah tersebut. Jangka waktu penebusan tanah gadai berdasarkan hukum adat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Hak gadai yang lamanya tidak ditentukan, dalam gadai tanah yang tidak ditentukan lamanya, maka pemilik tanah tidak boleh melakukan

²¹ Lilik Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasioal., Surabaya, hlm. 73.

penebusan sewaktu-waktu. Penebusan baru dapat dilakukan apabila pemegang gadai minimal telah melakukan satu kali panen. Hal ini disebabkan karena hak gadai merupakan perjanjian penggarapan tanah, bukan perjanjian pinjam meminjam uang.

- b. Gadai tanah yang lamanya ditentukan. Dalam hak gadai ini, pemilik tanah baru dapat menebus tanahnya kalau jangka waktu yang diperjanjikan dalam hak gadai berakhir.

Untuk gadai tanah yang dan pemilik tanah belum mampu menebus tanahnya, maka hal ini sudah dapat dikatakan wanprestasi.²² Hal inilah yang mendasarkan sehingga pemegang gadai diberikan hak untuk menganak gadaikan atau memindah gadaikan objek gadai.

Gadai tanah juga dapat berakhir tanpa dilakukan penebusan oleh pemilik tanah. Hal tersebut terjadi jika pemilik tanah menggadaikan tanahnya kepada penerima gadai dikarenakan ia mempunyai utang pada penerima gadai, dan pemegang gadai lalu mengusahakan tanah itu dengan memperhitungkan utang pemilik tanah sampai lunas, maka tanah gadai dikembalikan kepada pemilik tanah. Bentuk gadai tanah seperti ini disebut gadai pelunasan utang atau merupakan persetujuan pelunasan utang.²³

²² Soerjono Soekanto, 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers., Jakarta, hlm. 192.

²³ Hilman Hadikusuma. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju., Bandung. hlm. 226.

Perbedaan antara gadai tanah secara adat dengan gadai tanah dalam perdata barat, dapat dilihat dari segi objek gadai. Dalam hukum adat objek gadai adalah tanah, sedangkan dalam hukum perdata barat objek perjanjian pinjam meminjam uang dengan tanah sebagai jaminan utang adalah uang. Hak gadai menurut hukum adat merupakan perjanjian pokok yang berdiri sendiri, yang dapat disamakan dengan jual lepas atau jual tahunan. Jadi bukan merupakan perjanjian tambahan sebagaimana halnya gadai dalam pengertian hukum perdata barat. Perbedaan nyata antara Hak gadai menurut hukum adat dengan gadai menurut hukum perdata barat, adalah pada gadai terdapat satu perbuatan hukum yang berupa perjanjian penggarapan tanah pertanian oleh yang memberikan uang gadai, sedangkan gadai menurut hukum perdata barat terdapat dua perbuatan hukum yang berupa perjanjian pinjam meminjam uang sebagai perjanjian pokok dan penyerahan benda bergerak sebagai jaminan, sebagai perjanjian ikutan dan dari kesemuanya pengertian gadai.²⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian gadai dalam masyarakat adat merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, dalam hal ini perjanjian penggarapan tanah oleh pemilik tanah dengan pemberi uang gadai dimana dalam perjanjian tersebut melekat hak untuk menebus oleh pemilik tanah tanpa adanya pemaksaan dari pihak penerima gadai, setelah

²⁴ Lilik Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 62.

uang dikembalikan maka tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah semula dan secara otomatis perjanjian gadai telah berakhir.

2. Sifat dan Ciri-Ciri Gadai Tanah Dalam Masyarakat Adat

Sebagai kebiasaan yang hidup sejak dahulu kala dalam masyarakat adat gadai tanah mempunyai beberapa sifat dan ciri-ciri adalah sebagai berikut :²⁵

- a. Hak gadai jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu akan hapus ketika dilakukan penebusan oleh yang mengadaikan. Penebusan kembali tanah yang digadaikan kesemuanya tergantung pada kemauan dan kemampuan pemiliknya. Artinya ia tidak dapat dipaksakan untuk menebusnya. Hak menebus itu tidak hilang karena lampaunya waktu ataupun meninggalnya si pemilik tanah. Jika pemilik tanah meninggal dunia maka hak untuk menebus tanah tersebut beralih kepada ahli warisnya.
- b. Hak gadai tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai. Jika pemegang gadai meninggal dunia, maka hak tersebut berpindah kepada ahli warisnya.
- c. Hak gadai dapat dibebani dengan hak-hak tanah yang lain. Pemegang gadai berwenang untuk menyewakan atau membagi hasilnya kepada pihak lain.

²⁵ Lilik Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 94.

- d. Hak gadai dengan persetujuan pemilik tanahnya dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dalam artian hubungan gadai yang semula menjadi putus dan digadaikan dengan hubungan gadai yang baru antara pemilik dan pihak ketiga itu (menimbulkan gadai).
- e. Hak gadai tidak menjadi hapus, jika hak atas tanahnya dialihkan kepada pihak lain.
- f. Selama hak gadainya berlangsung, maka atas persetujuan kedua belah pihak, uang gadainya dapat di tambah (mendalami gadai)

3. Jenis-jenis Gadai

a. Gadai Biasa

Pada gadai biasa tanah dapat ditebus oleh pemilik tanah setiap saat, pembatasannya adalah satu tahun panen atau di atas tanah tersebut masih terdapat tumbuhan yang belum dipetik hasilnya dalam hal ini maka sipenerima gadai tidak berhak untuk menuntut agar si pemberi gadai menebus tanahnya pada suatu waktu tertentu.

b. Gadai Jangka Waktu

Pada gadai jangka waktu biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu wajib tebus, adalah sebagai berikut :

- 1) Gadai jangka waktu larang tebus terjadi apabila antara pemilik tanah dengan penerima gadai ditentukan bahwa jangka waktu tertentu pemilik tanah dilarang menebus tanahnya. Dengan demikian, maka apabila jangka waktu tersebut telah lewat gadai menjadi gadai biasa.

- 2) Gadai jangka Waktu Tebus

Gadai jangka waktu tebus, yakni gadai dimana oleh pemilik tanah dan penerima gadai ditentukan bahwa setelah jangka waktu tertentu tanah harus ditebus oleh pemilik tanah. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, maka hilanglah hak pemilik tanah atas tanahnya, sehingga menjadi jual lepas.

4. Hak Gadai Setelah Berlakunya UUPA

Menurut Hukum Agraria Nasional Pengertian hak gadai tercantum dalam penjelasan Umum UU No. 56 Prp 1960 angka 9a sebagai berikut:²⁶

“Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang uang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada pada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut”.

Sehubungan dari pada itu dalam UUPA hak-hak atas tanah yang mengandung unsur pemerasan (eksploitasi manusia terhadap manusia) ditetapkan sebagai hak yang berlaku sementara.²⁷ Ketentuan hak yang berlaku sementara ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUPA bahwa :

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat”.

Hak-hak yang dimaksud dalam pasal 53 ayat ayat (1) UUPA dinilai bertentangan dengan Pasal 7 dan pasal 10 UUPA, Pasal 7 UUPA melarang adanya penguasaan tanah secara berlebihan dan pasal 10 UUPA mewajibkan pemilik tanah untuk mengerjakan sendiri tanahnya

²⁶ Lilik Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasioal., Surabaya, hlm.85.

²⁷ Lilik Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasioal., Surabaya, hlm.90

dengan mencegah sifat pemerasan. Hal ini lah yang menjadi dasar sehingga hak-hak yang terdapat dalam pasal 53 ayat (1) UUPA diberikan hak yang bersifat sementara dan akan dihapuskan dalam waktu yang singkat.

Sifat pemerasan dalam pelaksanaan gadai tanah menurut Urip Santoso yaitu karena dalam gadai tanah, pemegang terus menerus menguasai dan menikmati hasil yang ada di atas tanah khususnya tanah pertanian selama pemilik tanah belum melakukan penebusan. Posisi dari pemegang gadai dalam pelaksanaan gadai tanah kebanyakan berada pada golongan ekonomi yang tinggi dibandingkan pemilik tanah. Menurut Boedi Harsono ketentuan yang terdapat dalam hukum adat pada umumnya mengandung unsur eksploitasi (pemerasan), karena hasil yang diterima oleh penerima gadai dari tanah gadai setiap tahunnya jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang diterima pemberi gadai (pemilik tanah).

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU No. 56 Prp Tahun 1960) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghilangkan pemerasan atas tanah pertanian yang telah digadaikan. Ketentuan tentang gadai tanah terdapat pada dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur mengenai berakhirnya gadai tanah setelah tujuh tahun dan penebusan

tanah gadai yang belum sampai tujuh tahun. Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn 1960 mengatur bahwa :²⁸

“Barang siapa mengusai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”.

Menurut ketentuan tersebut, jika hak gadai tanah yang sudah berlangsung tujuh tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa mengharapkan atau meminta uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman di panen. Hal ini diasumsikan bahwa pemegang gadai yang menggarap tanah pertanian dalam tujuh tahun atau lebih sudah mendapatkan hasil panen yang melebihi uang gadai yang ia berikan kepada pemilik tanah pertanian.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Setelah Berlakunya UUPA

Setelah dilakukan perjanjian gadai tanah, maka terdapat hak dan kewajiban antara pemilik tanah (pemberi gadai) dan penerima gadai. Hak dan kewajiban pemberi gadai yaitu :²⁹

- a. Setelah menerima uang gadai, maka segera tanah yang digadaikan itu diserahkan kepada pihak yang memberi uang atau disebut dengan pemegang gadai.

²⁸ Lilik Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasioal., Surabaya, hlm.96.

²⁹ Lilik Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasioal., Surabaya, hlm. 92

- b. Pemberi gadai dapat sewaktu-waktu menebus tanahnya dengan syarat pemegang gadai sudah memetik hasilnya (panen) paling sedikit satu kali.
- c. Jika tanah yang digadaikan musnah, pemberi gadai tidak dapat dituntut untuk mengembalikan uang gadai yang telah diterima.

Sedangkan hak dan kewajiban penerima gadai yaitu :

- a. Setelah membayar uang gadai, maka pemegang gadai menguasai tanah gadai tersebut, untuk dipelihara dan berhak pula menggunakan serta memungut hasilnya.
- b. Apabila sewaktu-waktu pemegang gadai ini membutuhkan uang, maka berhak melakukan pendalaman gadai dengan seijin pemilik tanah atau menganakkan gadai.
- c. Jika tanah gadai tersebut musnah karena bencana alam, maka pemegang gadai tidak boleh menuntut kembali uang gadainya.
- d. Wajib mengembalikan tanah gadai setelah dikuasai selama 7 tahun.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kab. Tana Toraja, yaitu di Kecamatan Mengkendek, tepatnya di Lembang Palipu. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh data awal yang didapatkan oleh penulis yang menemukan adanya peran Lembaga Adat Tongkonan dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian secara adat di lokasi tersebut.

B. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan berupa wawancara terhadap pemangku adat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah yang akan penulis teliti.
2. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah atau tempat yang terkait dengan masalah yang penulis teliti. Teknik penelitian ini berupa wawancara dengan pemangku adat Tongkonan Layuk Biang yang ada di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek dan pihak-pihak yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data langsung dari lapangan atau masyarakat setempat untuk kemudian dipelajari dan diolah.

2 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui berbagai sumber berupa literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas dalam tugas ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dasar-dasar teoritis dari permasalahan yang dibahas

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan peran Lembaga Adat Tongkonan dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu cara pemilihan dengan melihat sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri atau sifat yang diketahui sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Pemangku adat (*To Parengé*'), Kepala Lembang Palipu.
2. Masyarakat Lembang Palipu yang menggadaikan tanah pertaniannya.
3. Masyarakat Lembang Palipu yang bersengketa, berdasarkan latar belakang masalah.

E. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data dan Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang peran dari Lembaga Adat Tongkonan dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Tana Toraja

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas empat suku yaitu Suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Suku Toraja merupakan salah satu suku besar dari keempat suku tersebut dimana seluruh masyarakat Toraja menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Nama Toraja mulai dikenal ketika Toraja berinteraksi dengan daerah lain khususnya daerah Gowa, Luwu dan Sidenreng. Asal kata Toraja sendiri mempunyai berbagai macam pemahaman, menurut orang Makassar, Toraja berasal dari kata *Tau Raya* yang artinya orang yang berasal dari Timur. Penyebutan nama ini didasarkan oleh catatan kehidupan Puang Lakipadada selama berada di Gowa. Adapun menurut orang Luwu, Toraja berasal dari kata *To Riajang* yang berarti orang dari barat, ini didasarkan letak Toraja yang berada disebelah barat dari Luwu. Sedangkan menurut orang Sidenreng, Toraja berasal dari kata *To Riaja* dimana arti dari sebutan ini ialah orang yang berada di pegunungan yang lebih tinggi dari daerah Sidenreng. Dalam masyarakat Toraja sendiri, nama Toraja berarti *To Raa* atau *To Raya*. *Toraa* sendiri terdiri dari dua kata *To* dan *Raa* dimana *To* berarti Orang, *Raa* berarti murah hati jadi *To Raa* berarti orang pemurah hati dan penyayang. Sementara *To Raya* terdiri atas kata *To*

yang berarti orang dan *raya* yang berarti raja atau terhormat, sehingga *To Raya* berarti orang yang terhormat.³⁰

Adapun sub suku dari suku Toraja diantaranya: Toraja Bare'e, Toraja Tokea, Toraja Kolonedale, Toraja Seko, Toraja Galumpang, Toraja Mamasa, Toraja Duri, Toraja Sa'dan, Toraja Tae', Toraja Tae' dan Toraja Sa'dan lah yang selanjutnya mendiami kabupaten Tana Toraja sampai saat ini. Daerah adat di Tana Toraja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian kekuasaan adat, ialah sebagai berikut:

1. Bagian selatan, dikuasai oleh penguasa adat yang bergelar *Puang* dengan daerah adatnya bernama *padang dipuangi* atau daerah adat *kapuangan*. Daerah ini terdiri atas kelompok adat *Tallu Lembangna* (*Basse Kakanna Makale, Basse Tangana Sangalla, Basse Adinna Mengkendek*) dan *Tallu Batupapan (Endekan)*.
2. Bagian timur dan utara, dikuasai oleh penguasa adat bergelar *Siambe'* atau *Sokong Bayu*. Daerahnya dikenal dengan daerah adat *Padang Diambe'l*, dimana daerah ini terdiri atas :
 - Kelompok adat *Balimbing Kalua'*
 - Kelompok adat *Basse Sang Tempe'*
 - Kelompok adat *Seko dan Rongkong*.

³⁰ Peter Pata Sumbung, 2010, *Toraja Tallu Lembangna*, Keluarga Besar Tallu Lembangna Jabodetabek, Jakarta, hlm. 5.

3. Bagian barat, dikuasai oleh penguasa adat bergelar *Madika*. Daerah adatnya dikenal dengan daerah *Padang Dimadikai'*, dimana daerah adat ini terdiri dari *Tokalambunan* dan kelompok adat *Pitu Uluna Salu Karua Ba'bana Minanga*.

Adanya suatu kelompok adat seperti yang disebutkan di atas disebabkan adanya kesamaan tujuan dan kepentingan dalam membina suatu keluarga dan dorongan kesamaan penderitaan dalam membina kehidupan.

Kabupaten Tana Toraja secara administratif sejak 26 Desember 2008, kabupaten Tana Toraja telah resmi mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota Makale dan Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao.

Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lainnya, diantaranya :

- Sebelah utara : Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- Sebelah Barat : Propinsi Sulawesi Barat

Kabupaten Tana Toraja Pada era reformasi pelaksanaan otonomi daerah secara nyata mulai dibangun dengan menata ulang pemerintahan. Pranata ini dimulai dengan menggabungkan beberapa desa dalam suatu wilayah menjadi satu desa yang disebut *Lembang*. Lembang sebagai pengganti istilah desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat adat Tana Toraja, dimana pemerintahannya dilaksanakan oleh *Kepala Lembang* (kepala desa) didampingi oleh ketua adat sebagai penasehat. Kepala Lembang ini pada umumnya merupakan keturunan suatu Tongkonan yang memiliki pengaruh besar dalam suatu wilayah masyarakat.

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tana Toraja umumnya adalah bertani. Usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat adalah usaha tani tanaman pangan, usaha ternak dan usaha tani tanaman perkebunan dilakukan oleh masyarakat secara bersamaan artinya dalam satu keluarga biasanya dilakukan usaha tani dan usaha ternak tersebut. Hal ini disebabkan karena hasil dari bertani dan beternak misalnya vanili, kopi, beras, kakao, cengkeh, kerbau, babi, dan ayam digunakan atau dibutuhkan dalam berbagai upacara adat masyarakat Toraja setiap tahunnya.

Saat ini di Tana Toraja terdapat 5 (lima) macam agama yaitu Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Walaupun mereka sudah menganut agama tersebut di atas tetapi tetap saja ada yang

menggabungkan kepercayaan agama-agama tersebut dengan kepercayaan peninggalan nenek moyang yang berbau mistis.

Pelaksanaan upacara adat dalam masyarakat dilaksanakan berdasarkan ajaran-ajaran *Aluk Todolo*, baik upacara *Rambu tuka'* (rambu=asap, tuka'=naik) biasa juga disebut dengan *Aluk Rampe Matallo* (aluk=upacara, rampe=bagian, matallo=tempat matahari terbit) artinya upacara suka cita (ucapan syukur) yang dilaksanakan pada pagi hari, maupun upacara *Rambu Solo'* (rambu=asap, solo'=turun) yang biasa juga disebut *Aluk Rampe Matampu'* (matampu'= tempat matahari terbenam) artinya upacara yang dilaksanakan ketika matahari sudah tidak berada di tengah-tengah artinya lewat jam 12 (dua belas) siang.

Rambu Solo' sebagai suatu upacara adat budaya Tana Toraja dilaksanakan atas pemahaman leluhur (*dandanan sangka'*) pada masa lampau dan hingga kini ternyata masih diikuti oleh orang Toraja yang sudah memeluk agama lain yang sudah dibenarkan oleh ideologi pancasila di Indonesia. Begitu luasnya kegiatan *Rambu Solo'* itu dilaksanakan oleh orang Toraja, hal ini adalah amanah dan pesan leluhur kepada anak, cucu, cicit, serta berkesinambungan dalam ikatan manusia Toraja.

B. Latar Belakang Lembang Palipu

Lembang Palipu adalah sebuah daerah yang terletak di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Istilah lembang yang digunakan memiliki arti yang sama dengan desa. Luas Lembang Palipu yaitu 5,91 km².³¹

Dalam Lembang Palipu terdapat 3 (tiga) kampung (dusun), yakni :

1. Kampung Tanete
2. Kampung Palipu
3. Kampung Babana

Jumlah Penduduk Lembang Palipu :

Laki- laki	: 1037
Perempuan	: 1130
Total	: 2167

Jumlah Kepala Keluarga di Lembang Palipu sebanyak 501 KK

Lembang Palipu berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Lembang Bulean Masabu
2. Sebelah Timur : Kelurahan Lemo Marinding
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Tengan
4. Sebelah barat : Kelurahan Ariang

Di dalam Lembang Palipu terdapat 10 (sepuluh) Tongkonan Layuk, fokus penulis ialah Tongkonan Layuk Biang, pemilihan ini dikarenakan

³¹ Samuel Manuk Rante, Lembaran Data Potensi Lembang Palipu.

Tongkonan Layuk Biang sampai pada saat ini masih menjaga perannya dimasyarakat sebagai Lembaga Adat, dimana Tongkonan Layuk Biang yang diwakili oleh pemangku adat (*To' Parengé*) masih tetap berperan dalam melestarikan ajaran dan aturan-aturan leluhur yang mengikat masyarakat adat, menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu, dan berperan dalam transaksi tanah yang menjadi kebiasaan masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu. Sedangkan ke 9 (sembilan) Tongkonan lainnya untuk sementara tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga adat.

C. Tata Cara Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Dalam Masyarakat Adat Toraja di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

Gadai tanah atau jual gadai merupakan salah satu transaksi tanah yang sering dilakukan oleh masyarakat adat. Adapun gadai tanah merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, akan tetapi yang menyerahkan mempunyai hak untuk mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya.³²

Selama perjanjian gadai berlangsung pemegang gadai memiliki hak untuk mengelola serta memungut hasil dari pada tanah gadai yang

³² A. Suriyaman Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang*. Pelita Pustaka., Jakarta, hlm. 146.

sementara ia kuasai, sampai dilakukannya penebusan oleh pemilik tanah (pemberi gadai).

Pada dasarnya timbulnya gadai tanah dimasyarakat disebabkan karena himpitan ekonomi yang sangat mendesak. Masyarakat membutuhkan uang dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga dengan cara menyerahkan tanahnya untuk dikuasai sementara oleh orang lain dalam hal ini digadaikan, masyarakat dapat terbebas dari pada himpitan ekonomi tersebut.

Menurut Samuel Manuk Rante, Kepala Lembang Palipu, gadai tanah atau *ma'papentoean*, merupakan transaksi penyerahan tanah yang sejak dahulu sampai pada saat ini masih dilakukan oleh masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Adapun kebutuhan ekonomi menyangkut tentang biaya kebutuhan rumah tangga suatu keluarga, biaya sekolah anak, serta biaya dalam memenuhi atau menjalankan tuntutan adat *mantunu* dalam hal ini mengorbankan hewan kerbau atau babi dalam proses upacara kematian (*Rambu Solo*) keluarga atau kerabat.³³

Gadai tanah secara adat lebih dipilih oleh masyarakat lembang palipu karena proses gadai tanah mudah dalam hal ini tidak menyulitkan seseorang, tidak berbelit-belit, tidak adanya jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan penebusan, serta tidak adanya bunga setiap bulan yang

³³ Samuel Manuk Rante, Wawancara, 4 Maret 2015.

harus dibayar oleh pemilik tanah (pemberi gadai) kepada penerima gadai selama gadai itu berlangsung. Tidak seperti dengan lembaga-lembaga jaminan pada umumnya yang pengurusannya berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat dengan adanya bunga yang harus dibayar oleh si pemilik tanah.³⁴

Pada dasarnya gadai tanah bersifat sosial dimana tujuan dari pada gadai tanah ialah membantu keluarga atau kerabat yang sedang mengalami kesusahan yang menjadi dasar dari pelaksanaannya ialah rasa percaya antara kedua belah pihak.

Lebih lanjut, Kepala Lembang Palipu menambahkan bahwa gadai atau *ma' papentoean* merupakan cara seseorang membangun ikatan sosial dengan orang lain karena menurutnya, setiap pelaksanaan gadai mengandung unsur tolong menolong yang menghasilkan ikatan saling percaya sehingga secara tidak langsung ikatan tersebut membentuk tali silaturahmi antara pemilik tanah dengan pemberi uang. Sehingga dikemudian hari ketika penerima gadai mengalami kesusahan maka wajiblah pemberi gadai untuk membantunya karena ikatan kekeluargaan yang dihasilkan dari gadai tersebut.³⁵

Dalam beberapa masyarakat adat, baik tanah pertanian maupun tanah ulayat dapat digadaikan, dalam hal ini tanah ulayat baru dapat digadaikan

³⁴ Andarias Rerung (salah seorang masyarakat lembang palipu yang menggadaikan tanah pertaniannya), wawancara 5 Maret 2015

³⁵ Samuel Manuk Rante, Wawancara, 4 Maret 2015

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan adat istiadat dalam suatu masyarakat adat. Tetapi, tidak demikian halnya pada masyarakat adat Toraja khususnya di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek.

Menurut Samuel Seru', *To' Parengé'* Tongkonan Layuk Biang, bahwa tidak semua tanah yang ada dalam masyarakat adat Toraja secara khusus di Lembang Palipu dapat digadaikan, yang dapat digadaikan yaitu tanah pertanian tetapi tidak dengan tanah ulayat dalam hal ini tanah Tongkonan. Hal ini disebabkan karena tanah Tongkonan merupakan harta pusaka yang diwariskan oleh leluhur kepada seluruh keturunan yang ada pada suatu Tongkonan dimana di atasnya terdapat larangan (*pemali*) untuk menjual, menyewakan, dan menggadaikan bagi keturunan Tongkonan. Larangan atau *pemali* ini bersifat mengikat dan tidak boleh dilanggar oleh keturunan Tongkonan.³⁶

Pelaksanaan gadai tanah pertanian pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis maupun tertulis. Perjanjian gadai tanah pertanian dengan bentuk tidak tertulis (lisan) hanya berupa kata sepakat antara kedua belah pihak. Lain halnya dengan pelaksanaan gadai dalam bentuk tertulis, antara pemilik tanah dan penerima gadai setelah sepakat menggadaikan tanah, kemudian membuat berupa surat keterangan perjanjian gadai yang dipegang oleh masing-masing pihak yaitu pemilik

³⁶ Samuel Seru', Wawancara, 5 Maret 2015.

tanah selaku pemberi gadai dan pemberi uang selaku penerima gadai untuk dijadikan bukti dikemudian hari.

Lebih lanjut *To' Parenge'* menjelaskan, gadai atau *ma'papentoean* dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis yaitu gadai secara lisan, yang dilandaskan dengan kata sepakat oleh kedua belah pihak serta rasa kepercayaan terhadap masyarakat yang didasarkan oleh pemahaman *sangsiuluran* yang berarti seluruh masyarakat Lembang Palipu adalah keluarga sehingga rasa percaya antara masyarakat masih tetap dijunjung tinggi. Menurutnya, gadai tanah merupakan perjanjian adat yang menyangkut hak milik seorang masyarakat adat atas tanah sehingga gadai tanah dalam Lembang Palipu diatur oleh hukum adat dan mengikat seluruh masyarakat adat Toraja yang ada di Lembang Palipu sejak dahulu hingga saat ini. Hukum adat dalam pelaksanaan gadai salah satunya mengatur tentang pelaksanaan gadai, yang wajib disaksikan oleh *To' Parenge'* dan melalui proses adat sebelum *To' Parenge'* mengesahkan perjanjian gadai tersebut.³⁷

Dalam pelaksanaan gadai atau *ma' papentoean*, masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu, dari awal perjanjian gadai hingga berakhirnya gadai, mengenal 3 (tiga) tahap penting, yakni :³⁸

³⁷ Samuel Seru', Wawancara, 5 Maret 2015.

³⁸ Samuel Seru', Wawancara, 6 Maret 2015.

1. *Dimisararai*

Pada tahapan ini, pemilik tanah dan calon penerima gadai memberitahukan kepada *To' Parenge'*, bahwa akan dilaksanakan perjanjian gadai tanah atau *ma'papentoean*, yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh *To' Parenge'*. *To' Parenge'* selain menentukan waktu pelaksanaan, ia juga memberikan syarat kepada pemilik tanah dan calon penerima gadai yang harus dipenuhi, yaitu pemilik tanah dan calon penerima gadai wajib membawa seekor *manuk sella'* (ayam yang kakinya berwarna putih yang sering digunakan dalam upacara adat oleh masyarakat adat Toraja khususnya di Lembang Palipu). Setelah syarat tersebut terpenuhi maka dimulailah ritual *dimisararai* yaitu mengorbankan *manuk sella'* yang dibawa oleh pemilik tanah dan calon penerima gadai di depan Tongkonan disaksikan oleh *To' Parenge'* dan *peka'amberan* (tua-tua adat). Prosesi ritual ini wajib dilakukan oleh masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu ketika ingin melepaskan hak atas tanah kepada orang lain yang sifatnya sementara, didukung pula bentuk perjanjian dari gadai tanah yang merupakan bentuk dari perjanjian adat. Setelah ritual ini berakhir maka *To' Parenge'* mengucapkan "*e randukmi tau e*" dengan ucapan tersebut maka perjanjian gadai tanah (*ma'papentoean*) telah sah oleh *To' Parenge'*.

2. Melambi

Melambi adalah penyampaian yang dilakukan oleh pihak keluarga pemberi gadai kepada keluarga penerima gadai khususnya dilakukan pada gadai yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Penyampaian ini menerangkan bahwa tanah yang dikelola oleh penerima gadai adalah tanah gadai yang sementara berada dalam penguasaan penerima gadai dan akan berakhir ketika diadakan penebusan oleh pemberi gadai. Penyampaian (*melambi*) ini dilakukan pada upacara kematian (*rambu solo'*) oleh penerima gadai atau ahli waris sepanjang gadai belum ditebus. Pelaksanaan *melambi* ini selain melibatkan kedua belah pihak juga melibatkan *To' Parenge'* dan *peka'amberan* yang membantu memperjelas status tanah gadai tersebut.

3. Ma'sulang

Ma'sulang berarti penebusan gadai oleh pemilik tanah (pemberi gadai) atas tanah gadai. Dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu, *ma'sulang* merupakan kebiasaan masyarakat adat dalam menebus sebuah tanah gadai dengan menggunakan hewan kerbau. Panjang tanduk kerbau melambangkan utang dari si pemilik tanah. Perhitungan penebusan menggunakan kerbau ini (*ma'sulang*) disesuaikan ukuran panjang tanduk kerbau berdasarkan perjanjian awal. Adapun sebagai contoh, ketika perjanjian gadai dibuat 10

(sepuluh) tahun yang lalu antara kedua belah pihak dengan uang gadai yang diserahkan berjumlah 15 (lima belas) juta yang setara dengan harga kerbau yang memiliki panjang tanduk 30 cm (*tedong sang pala'*) di pasaran, tetapi setelah 10 (sepuluh) tahun berakhir, harga kerbau dengan panjang tanduk 30 cm naik menjadi 25 juta. Maka pemilik tanah wajib membeli kerbau tersebut meskipun harganya sudah melebihi uang gadai yang diterimanya pada 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Hal ini tidak menjadi persoalan bagi pemilik tanah karena sudah menjadi kewajibannya untuk menebus gadai tanah pertanian atau *ma'papentoean* tersebut berdasarkan perjanjian awal yaitu dengan kerbau yang panjang tanduknya 30 cm. Adapun *ma'sulang* dilakukan di depan Tongkonan dengan membawa kerbau yang digunakan untuk menebus serta *manuk sella'* untuk dikorbankan dalam menutup perjanjian gadai tanah (*ma'papentoean*). Setelah *To' Parenge'* mengukur tanduk kerbau berdasarkan keterangan pihak keluarga pemilik tanah dan penerima gadai, kemudian *manuk sella'* yang dibawa oleh pemilik tanah dan penerima gadai dikorbankan di depan Tongkonan dan disaksikan oleh *To' Parenge'* dan *peka'amberan*. Proses pengorbanan *manuk sella'* ini bertujuan untuk menutup sebuah perjanjian gadai. Setelah prosesi tersebut, *To' Parenge'* mengucapkan "*mangkami' tau' e*", yang artinya telah selesai penebusan sekaligus menutup akhir dari perjanjian gadai tanah (*ma'papentoean*).

Berbicara tentang gadai tanah, erat kaitannya dengan Pasal 7 UU No.56 Prp. Tahun 1960 yang menerangkan bahwa pemegang gadai wajib mengembalikan tanah kepada pemiliknya setelah gadai berlangsung selama 7 (tujuh) tahun tanpa menuntut pembayaran uang tebusan.

Menurut Samuel Manuk Rante, selaku Kepala Lembang Palipu, hanya sebagian kecil masyarakat di Lembang Palipu yang mengetahui Pasal 7 UU No. 56 Prp. Tahun 1960 ini. Adapun menurutnya, jika Pasal 7 ini diketahui oleh seluruh masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu mereka tidak akan menggunakan ketentuan tersebut dalam perjanjian gadai mereka, karena pemahaman mereka gadai dimulai dengan adanya rasa kekeluargaan (*sangsiuluran*), tolong-menolong sesama orang yang kurang mampu, serta jangka berlaku gadai tidak ditentukan sampai pemilik tanah mampu menebusnya apalagi gadai dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu melibatkan unsur adat-istiadat di dalamnya yang mengikat kewajiban dan larangan bagi kedua belah pihak. Salah satu kewajiban yang mengikat pemilik tanah ialah wajib membayar utang dalam hal ini wajib menebus tanahnya jika ingin tanahnya kembali.³⁹

Adapun menurut, Andarias Rerung, Pasal 7 UU No. 56 Prp. 1960 tidak dijadikan landasan dalam menggadaikan tanah pertaniannya, dengan alasan ia tidak mengetahui adanya ketentuan ini. Menurutnya, gadai *ma'papentoean* tidak dapat dibatasi dengan waktu selama 7 (tujuh) tahun

³⁹ Samuel Manuk Rante, Wawancara, 7 Maret 2015.

apalagi disertai ketentuan mengembalikan tanah gadai tanpa meminta uang tebusan kepada pemilik tanah, karena menurutnya gadai itu baru berakhir ketika dilakukan penebusan kepada penerima gadai jadi selama gadai belum ditebus maka tanah masih dalam penguasaan penerima gadai. Meskipun seandainya penerima gadai ingin mengembalikan tanahnya tanpa menuntut untuk dilakukan penebusan gadai dari padanya, ia tidak akan menerima tanahnya jika tidak membayar utang gadainya karena *masiri'* (*malu*) kepada penerima gadai dan juga kepada *To' Pareng'* karena tidak menjalankan kewajibannya selaku pemilik tanah yang digadaikan yakni menebus tanahnya kembali.⁴⁰

⁴⁰ Andarias Rerung (salah seorang masyarakat Lembang Palipu yang menggadaikan tanah pertaniannya), wawancara 7 Maret 2015.

D.Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian Dalam Masyarakat Adat Toraja di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

Lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan yang hidup dalam suatu masyarakat adat yang memiliki peran dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan maupun menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat adat.

Menurut Samuel Seru', *To' Pareng'e* Tongkonan Layuk Biang, lembaga adat yang ada dalam kehidupan masyarakat adat Toraja khususnya di Lembang Palipu yang merupakan suatu lembaga yang ada sejak dahulu kala yang disebut sebagai Tongkonan dan berperan dalam menata kehidupan masyarakat adat Toraja khususnya di Lembang Palipu. Pada mulanya Tongkonan dibuat oleh penguasa suatu wilayah adat (*puang*) sebagai lambang kebesaran dari suatu keluarga bangsawan yang memiliki masyarakat adat dibawah kekuasaannya. Masyarakat harus tunduk terhadap perintah dari seorang penguasa sekaligus pemangku adat dalam suatu wilayah adat (*lembang*).⁴¹

Dalam masyarakat adat Toraja pada umumnya, terdapat beberapa macam Tongkonan, yakni :⁴²

⁴¹ Samuel Seru, Wawancara 9 Maret 2015.

⁴² Peter Pata Sumbung, 2010, *Toraja Tallu Lembangna*, Keluarga Besar Tallu Lembangna Jabodetabek, Jakarta, hlm. 52.

1. *Tongkonan Layuk*, yaitu Tongkonan yang pertama-tama menjadi sumber pemerintahan dan kekuasaan serta membuat peraturan-peraturan agama dan aturan-aturan lainnya dimasyarakat.
2. *Tongkonan Kaparengesan*, yaitu Tongkonan ini didirikan oleh penguasa-penguasa adat setempat untuk melaksanakan pemerintahan atau *aluk* berdasarkan tongkonan layuk.
3. *Tongkonan Batu a'riri*, yaitu Tongkonan yang hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan warisan keluarga tapi tidak mempunyai kekuasaan atau peran adat.

Pada intinya Tongkonan Layuk merupakan Tongkonan tertua di masyarakat adat Toraja. Adapun Tongkonan Layuk pada saat ini menjalankan peran *kaparengesannya* dalam masyarakat adat Toraja sehingga Tongkonan Layuk dalam perannya membuat dan melestarikan aturan adat istiadat, serta menjalankan peran dari Tongkonan *kaparengesan* yaitu menjadi pelaksana dari aturan adat istiadat tersebut.

Ada sepuluh Tongkonan Layuk yang dulunya menjalankan peran *kaparengesan* (Lembaga Adat) dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu, kesepuluh Tongkonan Layuk tersebut ialah :⁴³

1. Tongkonan Layuk/*kaparengesan* Bunga Lalan
2. Tongkonan Layuk/*kaparengesan* Biang
3. Tongkonan Layuk/*kaparengesan* Tondon

⁴³ Samuel Seru', Wawancara 10 Maret 2015.

4. Tongkonan Layuk/*kaparengesan* Kalosi
5. Tongkonan Layuk/*kaparengesan* To' Kaluku.
6. Tongkonan Layuk/*kaparengesan* Ta' bak
7. Tongkonan Layuk/*kaparengesan* Paken
8. Tongkonan Layuk/*kaparengesan* Banua Ro'pok
9. Tongkonan Layuk/*kaparengesan* Buntu Liong
10. Tongkonan Layuk/*kaparengesan* Tiroali

Kesepuluh Tongkonan Layuk tersebut dulunya memiliki peran lembaga adat (*kaparengesan*) dalam kehidupan masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu. Tetapi saat ini, hanya satu dari ke 10 (sepuluh) Tongkonan Layuk yang menjalankan perannya sebagai lembaga adat yaitu Tongkonan Layuk Biang. Hal ini dikarenakan, hanya keturunan dari Tongkonan Layuk Biang yang dapat memenuhi syarat dalam *aluk ma lolo tua'* yaitu aturan leluhur yang mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi *To' Pareng'*. Adapun syaratnya ialah haruslah pandai dalam berbicara, pandai dalam menyusun sebuah silsilah keluarga (*ma'salu nene'*), mapan secara ekonomi, mengamalkan aturan agama, dipercaya oleh masyarakat adat serta mampu menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di dalam lingkup keluarga serta masyarakat. Sedangkan ke 9 (sembilan) Tongkonan Layuk untuk sementara tidak menjalankan perannya sebagai lembaga adat karena tidak ada keturunan dari ke 9 (sembilan) Tongkonan Layuk

tersebut yang memenuhi syarat dari *aluk malolo tua'* sehingga Tongkonan Layuk tersebut tidak menjalankan perannya sebagai Lembaga Adat (*kaparengesan*). Tetapi keturunan dari ke 9 (sembilan) Tongkonan Layuk tersebut masih memiliki gelar adat yaitu *peka'amberan* atau tua-tua masyarakat. Sifat dari pada gelar adat *peka'amberan* ini hanya berlaku sampai seorang keturunan dari ke 9 (sembilan) Tongkonan Layuk tersebut, menjadi seorang *To' Parenge'* yang pemilihannya didasarkan pada *aluk ma lolo tua'*. Adapun syarat yang telah ditentukan dalam *aluk ma lolo tua'* semuanya harus dipenuhi oleh calon *To' Parenge'* tetapi jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak layak menjadi seorang *To' Parenge'*. *To' Parenge'* dipilih oleh dewan adat yang terdiri dari seluruh keturunan suatu Tongkonan tempat calon *To' Parenge'* berasal dan perwakilan masyarakat adat yang memiliki ikatan erat dengan Tongkonan. *To' Parenge'* sebagai wakil sebuah Tongkonan Layuk yang melambangkan kepemimpinan dalam masyarakat adat Toraja khususnya di Lembang Palipu, pemilihannya tidak boleh dilaksanakan dengan sembarangan walaupun yang mencalonkan sebagai *To' Parenge'* adalah saudara sendiri tetapi jika dia tidak memenuhi syarat maka ia tidak boleh diangkat menjadi *To' Parenge'*.⁴⁴

Adapun peran suatu Lembaga Adat didasarkan pada aturan hukum adat yang hidup sejak dahulu kala dalam masyarakat adat.

⁴⁴ Samuel Seru', Wawancara 10 Maret 2015.

Menurut, Samuel Seru', yang menjadi landasan Tongkonan Layuk Biang dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga Adat ialah *aluk sanda saratu'* yang merupakan ajaran kehidupan sekaligus aturan hukum adat yang dibawa oleh salah satu dari ke 3 (tiga) *To' manurung* yang pernah datang ke Toraja yaitu *To' Manurung Puang Tamboro Langi'*.

Ajaran *aluk sanda saratu* merupakan penyempurnaan dari aluk 777 (*aluk sanda pitunna*). Aluk 777 diketahui merupakan ajaran pertama yang diturunkan oleh orang Toraja pertama yang mendirikan *Banua Puan* (istilah lain dari Tongkonan). Adapun ajaran *aluk sanda saratu* mengajarkan agar masyarakat hidup bersatu padu, saling mengasihi dan menjaga dalam kehidupan masyarakat adat Toraja khususnya di Lembang Palipu. Prinsip dari ajaran ini ialah "*Misa Kada Dipotuo Pantan Kada Dipomate*".⁴⁵

Lebih lanjut, *To' Parenge'* menjelaskan bahwa Tongkonan Layuk Biang selain menggunakan ajaran ini dalam perannya sebagai Lembaga Adat, juga melestarikannya dengan cara mengajarkannya kepada keturunan selanjutnya, bahkan diajarkan kepada masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu.⁴⁶

⁴⁵ Peter Pata Sumbung, 2010, *Toraja Tallu Lembangna*, Keluarga Besar Tallu Lembangna Jabodetabek, Jakarta, hlm. 94.

⁴⁶ Samuel Seru', Wawancara 11 Maret 2015.

Lembaga adat dalam menjalankan perannya pada saat ini tidak terlepas dari pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah diwakili oleh aparatur desa yang ada.

Menurut Samuel Manuk Rante, Kepala Lembang Palipu, pemerintah daerah Lembang Palipu wajib membina hubungan dengan lembaga adat Tongkonan dalam hal ini Tongkonan Layuk Biang, demi membangun daerah dalam hal wawasan nusantara (adat istiadat). Menurutnya, pemerintah lembang wajib memfasilitasi sebuah Lembaga Adat Tongkonan yang memiliki seorang pemangku adat, agar Tongkonan tersebut dapat menjalankan fungsinya, seperti yang tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Lembang.⁴⁷

Lebih lanjut, Kepala Lembang Palipu menjelaskan, Lembaga adat Tongkonan dalam hal ini Tongkonan Layuk Biang sangat berperan penting dalam membantu urusan pemerintahan, karena setiap kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tingkat pedesaan, Tongkonan Layuk Biang ikut membantu menjalankan kegiatan tersebut yang dikoordinir oleh *To' Parengé* agar masyarakat adat Toraja yang ada di Lembang Palipu mengikuti kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Lembang Palipu.

⁴⁷ Samuel Manuk Rante, Wawancara 12 Maret 2015.

Kepercayaan masyarakat adat merupakan faktor utama suatu Lembaga adat dalam menjalankan perannya, karena kepercayaan suatu masyarakat adat kepada sebuah Lembaga Adat membuat Lembaga Adat tersebut tetap bertahan dan menjalankan perannya sampai pada saat ini.

Menurut Samuel Seru', masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu, seluruhnya masih percaya kepada ke 10 (sepuluh) Tongkonan Layuk meskipun 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) Tongkonan untuk sementara tidak menjalankan perannya sebagai lembaga adat karena belum memiliki seorang *To' Parenge'*. Adapun kepercayaan masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu terhadap sebuah Tongkonan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak dahulu kala, ditinjau dari status Tongkonan yang merupakan Tongkonan Layuk dan merupakan rumah dari penguasa adat yang dahulu kala memimpin masyarakat adat Toraja khususnya di Lembang Palipu. Adapun faktor lainnya ialah status sosial masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu khususnya bagi mereka yang berstatus seorang hamba (*kaunan*) yang dilahirkan untuk patuh dan taat kepada seluruh keturunan Tongkonan Layuk. Meskipun pada saat ini tidak ada lagi pembagian status sosial dalam masyarakat Indonesia karena sudah merdeka, akan tetapi dalam masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu

status sosial masih tetap hidup dan mengikat seseorang begitu pula keturunannya.⁴⁸

Lembaga Adat selain memiliki peran dalam melestarikan aturan adat istiadat, lembaga adat juga memiliki peran yang sangat penting yaitu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam suatu masyarakat adat.

Menurut Samuel Manuk Rante, dalam masyarakat adat Toraja khususnya di Lembang Palipu, lembaga adat Tongkonan dalam hal ini Tongkonan Layuk Biang' diwakili oleh *To' Parengé'*, sangat membantu aparat pemerintah khususnya di tingkat lembang dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi dalam masyarakat adat.⁴⁹

Kehadiran Tongkonan Layuk Biang ini sangat membantu bagi para aparat Lembang Palipu dalam menjalankan peran dari aparat Lembang yaitu menata kehidupan masyarakat adat yang hidup di dalam Lembang Palipu.

Tidak semua masalah yang terjadi pada masyarakat adat ditangani oleh lembaga adat ini, dikarenakan lembaga adat tersebut membatasi perannya dalam menyelesaikan suatu masalah didukung pula pengaruh Hukum Nasional yang kian lama mempengaruhi kehidupan suatu masyarakat adat maupun lembaga adat itu sendiri.

⁴⁸ Samuel Seru', Wawancara 13 Maret 2015.

⁴⁹ Samuel Manuk Rante, Wawancara 14 Maret 2015.

Tongkonan Layuk Biang dalam menyelesaikan suatu masalah didasarkan pada aturan hukum adat yang ada, tetapi pada saat ini Tongkonan Layuk Biang membatasi perannya dalam menyelesaikan suatu masalah, yaitu tidak lagi menyelesaikan masalah pembunuhan, melainkan menyerahkan masalah pembunuhan kepada pihak yang berwajib baik itu pihak kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun bukan berarti Tongkonan Layuk Biang lepas tangan atas masalah pembunuhan, melainkan setelah pelaku menjalani hukuman yang ditetapkan Undang-undang lewat proses pengadilan, barulah Tongkonan hadir memberikan sanksi adat kepada si pelaku.⁵⁰

To' Parenge' menjelaskan bahwa, ada banyak masalah yang telah diselesaikan oleh Tongkonan Layuk Biang, salah satunya ialah sengketa gadai tanah pertanian (*ma' papentoean*), yang melibatkan Simon Toto selaku ahli waris pemberi gadai dan Markus Pasang selaku ahli waris penerima gadai. Adapun masalah sengketa gadai ini timbul ketika Markus Pasang selaku ahli waris penerima gadai tidak lagi mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah gadai melainkan ia mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang diwariskan turun temurun dalam keluarganya, sehingga hak dari Simon Toto selaku ahli waris pemberi gadai dianggap tidak pernah ada oleh Markus Pasang. Menanggapi pernyataan Markus

⁵⁰ Samuel Seru', Wawancara 15 Maret 2015.

Pasang, Simon Toto selaku ahli waris pemberi gadai mengadukan sengketa ini kepada *To' Parenge'*. Setelah *To' Parenge'* mendengar pengaduan tersebut, ia mengadakan pertemuan khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa ini (*dikombongan*) yang melibatkan *To' Parenge'*, *peka'amberan dari 9 (sembilan)* Tongkonan Layuk yang ada di Lembang Palipu, *penghulu aluk to' dolo*, Kepala Lembang Palipu, serta pihak yang bersengketa (Simon Toto dan Markus Pasang). Dalam pertemuan ini diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menjelaskan hak yang ada pada tanah tersebut.⁵¹

Ahli waris pemberi gadai dalam hal ini Simon Toto memberikan penjelasan, bahwa tanah tersebut adalah tanah gadai, yang pada awal pelaksanaan gadainya melibatkan Ne' Toto dan Ne' Tangke selaku pemberi gadai dan penerima gadai. Adapun tanah tersebut digadaikan oleh Ne' Toto karena ingin membeli seekor kerbau yang nantinya akan dikorbankan dalam upacara kematian saudaranya. Lebih lanjut Simon Toto menjelaskan, bahwa gadai tanah ini telah berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun yang pelaksanaannya dilangsungkan melalui ritual *dimisararai*, serta dalam pelaksanaannya telah dua kali dilakukan penyampaian (*melambi*) oleh pihak pemberi gadai. *Melambi* pertama dilakukan oleh Ne' Toto kepada Rombe Pasak (orang tua dari Markus Pasang), yang kedua dilakukan oleh Yulius Toto (orang tua dari Simon

⁵¹ Samuel Seru', Wawancara 15 Maret 2015.

Toto) kepada Markus Pasang. Adapun masalah sengketa gadai ini timbul ketika Simon Toto ingin melakukan penebusan atas tanah gadai tersebut tetapi sebelum itu, ia harus menghadap kepada ahli waris pemegang gadai yakni Markus Pasang dan menyampaikan bahwa akan diadakan penebusan atas tanah gadai tersebut, tetapi di sisi lain Markus Pasang menolak dan mengatakan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah gadai melainkan tanah yang diwariskan turun temurun dalam keluarganya.⁵²

Setelah Simon Toto menjelaskan masalah yang terjadi, adapun Markus Pasang memberikan penjelasan, bahwa tanah yang menurut Simon Toto itu bukanlah tanah gadai, melainkan tanah yang diwariskan turun temurun dalam keluarganya, dalam hal ini ia menekankan bahwa tidak pernah neneknya (Ne' Tangke) menerima gadai dari Ne' Toto.⁵³

Setelah kedua belah pihak yang bersengketa menyampaikan penjelasannya, kini diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghadirkan saksi. Adapun dalam *dikombongan* ini Simon Toto menghadirkan saksi yakni Ne' Tandi yang berdasarkan keterangan Simon Toto selaku ahli waris pemberi gadai, merupakan satu-satunya dari ke 9 (sembilan) saksi (*peka'amberan*) yang masih hidup, yang dulunya terlibat dalam ritual *dimisararai* dan penyampaian (*melambi*) yang dilakukan oleh keluarga pemberi gadai.

⁵² Simon Toto, (ahli waris pemberi gadai), Wawancara 16 Maret 2015.

⁵³ Markus Pasang, (ahli waris penerima gadai), Wawancara 16 Maret 2015.

Sebelum memberikan kesaksiannya, Ne' Tandi selaku saksi wajib diambil sumpahnya oleh *penghulu aluk to' dolo*, yang inti dari sumpahnya ialah mewajibkan Ne' Tandi untuk berbicara jujur dan tidak boleh sekali-kali berkata bohong, jika Ne' Tandi berkata bohong maka *deata* (*dewa-dewa*) serta arwah-arwah leluhur akan menjatuhkan musibah kepadanya. Berdasarkan kepercayaan masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu, sumpah dihadapan seorang *penghulu aluk to' dolo* adalah sumpah yang mengandung unsur magis yang mendatangkan kerugian bagi seseorang jika berani melanggar sumpah tersebut. Setelah diambil sumpahnya, Ne' Tandi dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa betul telah terjadi upacara pengesahan perjanjian gadai oleh *To' Parenge'* (*dimisararai*) yang melibatkan Ne' Toto dan Ne' Tangke pada 30 (tiga puluh) tahun yang lalu. Dalam pelaksanaan ritual *dimisararai* ini, Ne' Tandi sebagai salah satu saksi dari ke 9 (sembilan) *peka'amberan* yang mewakili tiap Tongkonan Layuk yang ada di Lembang Palipu. Adapun dalam pelaksanaan gadai tanah ini menurut Ne' Tandi sudah dua kali dilakukan penyampaian (*melambi*) oleh pemberi gadai kepada penerima gadai. Penyampaian pertama berdasarkan kesaksian dari Ne' Tandi dilakukan oleh Ne' Toto kepada Rombe Pasak (orang tua dari Markus Pasang) dan penyampaian kedua dilakukan oleh Yulius Toto (orang tua dari Simon Toto) kepada Markus Pasang yang dalam seluruh pelaksanaan *melambi* ini melibatkan Ne' Tandi yang merupakan salah satu dari ke 9 (sembilan) saksi

peka'amberan yang terlibat dalam proses *melambi* ini. Dalam kesaksiannya, Ne' Tandi mengingatkan kepada Markus Pasang bahwa perjanjian gadai yang telah melalui ritual *dimisararai* merupakan perjanjian adat yang mengikat hak penguasaan tanah yang bersifat sementara oleh penerima gadai. Tidak boleh sekali-kali penerima gadai lupa, apalagi dengan sengaja ingin menghilangkan hak dari Simon Toto yang menurut Ne' Tandi adalah ahli waris pemberi gadai. Jika Markus Pasang bermaksud untuk menyangkali atau dengan sengaja menghilangkan hak dari pemberi gadai dia akan merusak hubungan kekeluargaan (*sangsiuluran*) yang ada pada masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu dan akan mendatangkan kesialan bagi dirinya karena telah mengingkari perjanjian adat *dimisararai*. Dilain sisi, Markus Pasang pada proses *dikombongan* ini tidak memiliki saksi untuk membela penjelasannya.⁵⁴

Setelah mendengarkan penjelasan kedua belah pihak dan keterangan saksi dari pihak Simon Toto yaitu Ne' Tandi, *To' Parenge'* menghentikan proses *dikombongan* untuk sementara waktu dan menugaskan kepada ke 9 (sembilan) *peka'amberan* yang ikut dalam proses *dikombongan* untuk menanyakan kepada masyarakat adat Toraja yang ada di Lembang Palipu yang mungkin secara adat tidak terlibat dalam proses pengesahan gadai (*dimisararai*) tetapi secara berkehidupan dalam masyarakat mengetahui kepemilikan yang sah atas tanah yang menjadi

⁵⁴ Samuel Seru', Wawancara 16 Maret 2015.

persengketaan tersebut. Berdasarkan keterangan yang diterima oleh para *peka'amberan* dari masyarakat adat Toraja di lembang palipu dengan memperkirakan umur masyarakat yang ditanya dalam hal ini sama atau lebih tua umurnya dari Ne' Tandi (saksi Simon Toto). Adapun seluruh masyarakat yang ditanya oleh *peka'amberan* menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah tanah sah milik Ne' Toto yang digadaikan kepada Ne' Tangke meskipun mereka tidak terlibat dalam upacara pengesahan dari gadai tersebut, tetapi dalam berkehidupan masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu mengetahui bahwasanya tanah tersebut tanah yang sementara digadaikan.⁵⁵

Lebih lanjut, *To' Parenge'* menjelaskan, setelah *peka'amberan* mendapatkan penjelasan dari masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu, proses *dikombongan* yang dilaksanakan di Tongkonan Layuk Biang dilanjutkan kembali dengan melibatkan pihak-pihak yang sama pada waktu awal pelaksanaannya. Dalam proses *dikombongan* ini *To' Parenge'* mengumumkan bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut adalah tanah gadai dengan mempertimbangkan sifat kedua belah pihak dimana pihak Simon Toto memiliki kelakuan baik dalam hal ini ia tidak lupa dengan kewajiban adatnya dan tetap ingin melakukan penebusan demi menjaga ikatan kekeluargaan (*sangsiuluran*), sedangkan pihak Markus Pasang sudah melakukan perbuatan yang dapat merusak hubungan

⁵⁵ Samuel Seru', Wawancara 17 Maret 2015.

kekeluargaan (*sangsiuluran*) yang dijaga sejak dahulu oleh masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu dengan cara menyangkali hak atas ahli waris pemberi gadai. Pertimbangan kedua ialah saksi dari pihak Simon Toto yaitu Ne' Tandi yang telah berani bersumpah di depan *penghulu aluk to' dolo'* dan menyampaikan kesaksiannya dalam hal ini menguatkan dan menekankan bahwa tanah tersebut adalah tanah gadai yang telah melalui upacara *dimesararai* dan dalam pelaksanaan telah dua kali diadakan *melambi*, dan pertimbangan ketiga ialah hasil tanya jawab *peka'amberan* kepada masyarakat adat Lembang Palipu yang memang tidak terlibat dalam pelaksanaan pengesahan gadai (*misararai*) tetapi dalam berkehidupan bermasyarakat mengetahui bahwasanya tanah tersebut tanah milik Ne' Toto (nenek ahli waris pemberi gadai) yang sementara digadaikan. Dengan demikian kesimpulan telah diambil oleh *To' Parenge'* dalam proses *dikombongan* dan mewajibkan bagi ahli waris pemberi gadai (Simon Toto) agar secepatnya melakukan penebusan tanah gadai (*ma'sulang*) dalam hal ini dengan kerbau yang panjang tanduknya berdasarkan keterangan dari Simon Toto selaku ahli waris pemberi gadai yang dalam pelaksanaan penebusan ini wajib dilakukan di depan Tongkonan Layuk Biang. Adapun ahli waris penerima gadai (Markus Pasang) setelah penebusan oleh ahli waris pemberi gadai dilakukan, maka wajib baginya mengembalikan tanah gadai tersebut kepada Simon Toto selaku ahli waris pemberi gadai. Tidak terlepas dari hal tersebut,

mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Markus Pasang telah melanggar aturan hukum adat karena telah bermaksud untuk menghilangkan hak dari ahli waris pemberi gadai (Simon Toto) dengan cara mengakui tanah gadai tersebut sebagai tanah yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya, maka *To' Parenge'* menjatuhkan sanksi adat kepada ahli waris penerima gadai berupa denda, yang mewajibkan ahli waris penerima gadai menyerahkan setengah dari hasil panen tanah miliknya yaitu pada panen pertama sampai panen ketiga.⁵⁶

Adapun sanksi adat diberikan oleh seorang pemangku adat ketika seorang terbukti melakukan pelanggaran adat yang merugikan orang lain. Pada dasarnya tujuan pemberian sanksi adat untuk memberikan efek jera bagi seorang yang melakukan pelanggaran agar tidak mengulangnya lagi.

Pemberian sanksi adat dalam sengketa gadai ini pada dasarnya untuk memperbaiki sekaligus membangun ikatan kekeluargaan yang sempat rusak akibat dari perbuatan sepihak ahli waris penerima gadai. Adapun sanksi adat ini bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh pihak ahli waris penerima gadai.⁵⁷

Menurut Markus Pasang, ahli waris penerima gadai, sanksi adat yang diberikan oleh *To' Parenge'* kepadanya merupakan hukuman akibat dari

⁵⁶ Samuel Seru', Wawancara 17 Maret 2015.

⁵⁷ Samuel Seru', Wawancara 18 Maret 2015.

pada perbuatannya kepada Simon Toto, bahwasanya ia telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum adat yaitu sengaja menghilangkan hak atas tanah si pemberi gadai dalam hal ini Simon Toto yang mengakibatkan dirinya menyangkali perjanjian adat yaitu *dimesararai*. Menurutny, ia menerima hasil yang ditetapkan oleh *To' Parengé'* karena ia telah melakukan kesalahan dan sebagai wujud penyesalannya ia akan menjalankan sanksi adat tersebut, tidak terlepas dari itu ia juga menerima hasil yang ditetapkan oleh *To' Parengé'* Tongkonan Layuk Biang karena itu sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu mengingat *To' Parengé'* Tongkonan Layuk Biang merupakan keturunan dari Penguasa Adat yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat adat Toraja yang hidup di dalam Lembang Palipu.⁵⁸

Adapun dalam penyelesaian suatu masalah dalam masyarakat adat Toraja mengenal tiga tahapan, yaitu : penyelesaian masalah ditingkat Lembaga Adat Tongkonan yang ada di tiap Lembang, penyelesaian masalah ditingkat Kecamatan, dan yang terakhir penyelesaian masalah ditingkat Pengadilan.

Pada dasarnya gadai yang ada di masyarakat adat Toraja Lembang Palipu berlandaskan pada asas kekeluargaan (*sangsiuluran*) dan aturan adat istiadat, sehingga dalam menyelesaikan suatu sengketa gadai cukup

⁵⁸ Markus Pasang, Wawancara 19 Maret 2015.

hanya dengan melibatkan Tongkonan Layuk Biang yang diwakili oleh *To' Parenge'*, karena dengan melibatkan Tongkonan dalam menyelesaikan sengketa gadai hubungan keluarga yang tadinya rusak dapat diperbaiki dan diertakan kembali oleh pemangku adat (*To' Parenge'*).⁵⁹

Adapun penyelesaian sengketa gadai di Lembang Palipu sama dengan penyelesaian sengketa gadai di Lembang lain yang ada di Kabupaten Tana Toraja, yaitu diselesaikan di Lembaga Adat Tongkonan.⁶⁰

Menurut Simon Toto, ahli waris pemberi gadai, penyelesaian sengketa gadai di Tongkonan Layuk Biang yang melibatkan dirinya dan Markus Pasang tidak diserahkan ke pengadilan karena ia menghormati *To' Parenge'* selaku pemangku Adat Tongkonan Layuk Biang juga selaku penguasa masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu yang dapat menyelesaikan dan mengembalikan hak dia sebagai ahli waris pemberi gadai, menghormati hubungan kekeluargaan (*sangsiuluran*) yang ada di Lembang Palipu serta menjaga sekaligus menghormati hak dari penerima gadai yaitu mendapatkan tebusan atas tanah gadai tersebut. Menurutnya hasil putusan pengadilan menguntungkan satu pihak saja, yang akan merusak hubungan keluarga bukan hanya pada saat ini tapi akan turun

⁵⁹ Samuel Seru', Wawancara 20 Maret 2015.

⁶⁰ Samuel Manuk Rante, Wawancara 20 Maret 2015.

temurun keluarga pihak yang bersengketa akan seterusnya tidak saling menghormati.⁶¹

Penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian dalam masyarakat adat Toraja pada umumnya tidak sampai ke pengadilan dalam hal ini diselesaikan cukup di Lembaga Adat Tongkonan, ini dibuktikan oleh penulis dalam mencari data-data perkara atau putusan tentang sengketa gadai dalam situs resmi Pengadilan Negeri Makale (www.pn-makale.go.id/index.php/home) yang dalam pencarian ini penulis tidak menemukan adanya perkara maupun putusan Pengadilan Negeri Makale yang menyangkut tentang penyelesaian sengketa gadai yang terjadi dalam masyarakat adat Toraja. Hal ini didasarkan kepercayaan masyarakat adat Toraja tentang gadai yang memiliki arti tolong menolong antar sesama masyarakat, adapun ketika terjadi sengketa dikemudian hari, sengketa tersebut akan diselesaikan di Lembaga Adat Tongkonan dalam hal ini melibatkan *To' Parenge'* berdasarkan musyawarah kekeluargaan yang berlandaskan hukum adat.

⁶¹ Simon Toto, Wawancara 21 Maret 2015.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tata cara pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat adat Toraja khususnya di Lembang Palipu dilaksanakan dalam bentuk lisan, dikarenakan rasa kepercayaan yang didasari oleh ikatan kekeluargaan (*sangsiuluran*). Pelaksanaan gadai tanah pertanian dalam masyarakat ada Toraja di Lembang Palipu wajib melibatkan seorang *To' Parenge'* Tongkonan Layuk Biang, karena gadai merupakan perjanjian adat sehingga yang mengesahkan perjanjian gadai ialah seorang *To' Parenge'*. Dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian di masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu melalui 3 (tiga) tahap penting, yaitu : *dimisararai* (tahap pengesahan gadai oleh *To' Parenge'*), *melambi* (penyampaian keluarga pemberi gadai kepada keluarga penerima gadai pada saat upacara *Rambu Solo'* penerima gadai), *ma'sulang* (penebusan tanah gadai dengan kerbau sekaligus penutup suatu perjanjian gadai oleh *To' Parenge'*). Adapun Pasal 7 UU No. 56 Prp. Tahun 1960 tidak dijadikan dasar dari pelaksanaan gadai tanah pertanian oleh masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu karena gadai tanah pertanian merupakan perjanjian adat yang mengikat ketentuan bahwa tanah yang digadaikan baru dapat

dikembalikan ketika sang pemilik tanah/pemberi gadai membayar utang gadainya.

2. Lembaga Adat Tongkonan dalam melaksanakan perannya menyelesaikan sengketa gadai diwakili oleh seorang *To' Pareng'*, yang merupakan seorang keturunan penguasa adat yang wajib dihormati oleh setiap masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu. Adapun keputusan Lembaga Adat Tongkonan dalam menyelesaikan sengketa gadai dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan sehingga cukup diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan yang didasarkan oleh aturan hukum adat.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian harusnya bentuk dari perjanjian gadainya dilaksanakan dalam bentuk tertulis untuk dikemudian hari dijadikan bukti oleh ahli waris guna menerangkan bahwa telah terjadi perjanjian gadai.
2. Hendaknya pemerintah daerah bekerja sama dengan pemangku Lembaga Adat Tongkonan mengadakan suatu lembaga yang memberikan pinjaman uang di tiap Lembang yang dalam prosedurnya tidak berbelit-belit dan tidak menyusahkan masyarakat adat. Pengadaan lembaga ini demi untuk membantu masyarakat yang mengalami himpitan ekonomi yang mendesak sekaligus mengurangi sengketa gadai dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Suriyaman. Mustari Pide. 2009. *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Pelita Pustaka.
- Boedi. Harsono. 1999. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Muhammad. Bushar. 2002. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Effendi. Parangin. 1986. *Mencegah Sengketa Tanah*. Jakarta: Rajawali.
- Hilman. Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Imam. Sudiyat. 1981. *Hukum Adat : Sketsa Asas*. Jogjakarta: Liberty.
- Lilie. istiqomah. 1982. *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mohammad. Nadsir Sitonda. 2007. *Toraja Warisan Dunia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Peter. Pata Sumbung. 2010. *Toraja Tallu Lembangna*. Jakarta: Keluarga Besar Tallu Lembangna. Jabodetabek.
- Soerojo. Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Joko Gunung Agung.
- Soerjono. Soekanto. 2002. *Hukum Adat Indonesia (Cet V)*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Perkasa.
- Tangdilintin. 1983. *Toraja dan Ke budayaannya*. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan.
- Urip. Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Van Dijk. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terjemahan : A. Soehardi.
Bandung: Mandar Maju.

Sumber Lain :

Wawancara :

Petrus, Wawancara, Fungsi Tongkonan, Mengkendek Tana Toraja, 21 Desember 2014.

Yohanis, Wawancara, *Tongkonan dan Kepala Lembang*, Mengkendek Tana Toraja, 24 Desember 2014.

Yakobus Sombolinggi, Wawancara, *To parengge'*, Mengkendek Tana Toraja, 31 Desember 2014.

Dani Tulak, Wawancara, *Penghargaan Kepada Tongkonan*, Mengkendek Tana Toraja , 2 januari 2015.

Website :

<http://www.slideshare.net/inomimou/lembaga-adat>

http://sdmuhcc.net/elearning/aridata_web/how/p/Pakaian_Daerah/18_KELEMBAGAN%20MASYARAKAT%20ADAT%20DESA%20DI%20TANA%20TORAJA.htm

<http://www.mongabay.co.id/2014/09/12/jika-tak-ada-hutan-tongkonan-akan-punah/>